

# Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

✓ Analisis Kritis Tuduhan Terorisme terhadap Islam

*Prayudi*

Pelaku Media dalam Memandang Persoalan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

*Susilastuti D.N.*

Analisis Penetapan Biaya Pelayanan Perguruan Tinggi

*Susanta*

Pengaruh Tingkat Pendidikan Sekolah terhadap Motivasi Bekerja sebagai Petani di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY

*Hari Waluyo Sedjati*

Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kemudahan Penggunaan, Sikap, dan Adopsi Simbolik Teknologi Informasi

*Adi Suprpto*

*Creative Industries and Student Entrepreneurial Spirit (Study on the Students of Informatics Techniques UPNVY)*

*Sri Suryaningsum*

**ANALISIS KRITIS TUDUHAN TERORISME TERHADAP ISLAM****Prayudi**

Email: yudhi\_ahmad@yahoo.com

**Abstrak**

*This writing will analyze the debate about terrorism definition, Islam, and how Islam consider to terrorism action and the context cover it. The increasing of terrorism action, recently, have brought out into view about terrorism definition discourse. In the same time, discuss about Islam and the values of messages bringing by Muhammad also being a hot issue to talk. An effort of going to force Islam into corner by making identical Islam with terrorism is, actually, a misperception.*

**Key words:** terrorism, jihad, and Islam

**Pendahuluan**

Tulisan ini menganalisis hubungan antara Islam dan terorisme. Penulis berargumen bahwa sesungguhnya Islam tidak identik dengan terorisme. Bahkan tidak ada agama di dunia yang mengajarkan kekerasan kepada orang lain yang bukan umatnya. Namun bahwa ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dan menggunakan pendekatan kekerasan dan menyebar teror dalam mencapai tujuan politiknya tidak bisa dipungkiri. Pengakuan para pelaku bom bunuh diri Bali 2005 yang direkam dalam bentuk vcd (*video compact disc*) dan akhirnya tersebar dalam jaringan media global menjadi bukti adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam.

Bagaimana definisi terorisme itu muncul harus dilihat dari siapa yang memberikan definisi tersebut dan konteks yang melingkupi kemunculan definisi. Fakta historis kultural menunjukkan bahwa sesungguhnya definisi terorisme itu dibentuk secara kultural, politik dan sosial.

Di sisi lain, citra Islam yang dihubungkan dengan beberapa aksi terorisme yang diklaim dilakukan oleh kelompok Islam radikal berdampak pada pemahaman yang sempit terhadap Islam. Tulisan ini berusaha menganalisis pemahaman analisis politik Barat yang keliru terhadap Islam dan bagaimana pemahaman keliru ini sengaja dikembangkan untuk menciptakan stigmatisasi negatif terhadap Islam.

Beberapa pertanyaan yang coba dijawab

melalui tulisan ini adalah apa yang dimaksud dengan terorisme? Apa batasan terorisme sehingga aksi ini berbeda dengan peperangan atau kriminal? Apa yang dimaksud dengan Islam? Bagaimana Islam telah diasosiasikan dengan kekerasan? Bagaimana Islam memandang terorisme?

Secara umum semua isu ini dianalisis dalam konteks global. Pada waktu bersamaan, semua isu ini diuji di dalam konteks sosial dan politik Indonesia dan bagaimana perubahan-perubahan faktor sosial dan politik mempengaruhi Islam baik sebagai agama maupun sebagai ideologi politik.

**Terorisme: Perdebatan Definisi dan Konteks**

Upaya mendefinisikan arti terorisme telah menjadi kontroversi di kalangan sarjana dan analis politis. Beragam analisis, institusi dan bahkan pemerintah tiap-tiap negara memiliki cara dan konsep sendiri dalam memaknai arti terorisme. Sebagaimana dikatakan oleh Truman (2003), "Akademisi dan ahli teori tidak lebih baik dalam memberikan definisi dibanding pemerintah dan para ahli yang mempekerjakan. Hal ini mengarah pada beragam kemungkinan pendefinisian dan telah menciptakan kekacauan tersendiri di sekitar kata tersebut".

Pada satu tingkatan, kesulitan pendefinisian berakar pada evaluasi terhadap tindakan teroris yang bisa dianggap sebagai tindakan yang hina atau sebagai alat justifikasi pencapaian tujuan politis; bisa juga dianggap sebagai perbuatan jahat dari teroris yang sadis ataukah tindakan yang



dapat dijustifikasi dari para pejuang kebebasan dan/atau para pejuang Tuhan. Pada tingkatan yang lain, kontroversi definisi terorisme berakar di dalam perselisihan paham sekitar bagaimana cara menggolongkan penggunaan kekuatan oleh kelompok-kelompok atau individu yang termotivasi secara politis pada satu sisi dan oleh pemerintah di sisi yang lain (Nacos 2002). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya definisi makna terorisme dibangun secara kultural. Hal ini berarti bahwa konsep dari terorisme berkembang dalam suatu konteks kultur yang lebih luas dan mencakup faktor historis, politik, dan sosial yang berubah dari waktu ke waktu.

Martha Crenshaw percaya bahwa upaya pendefinisian makna terorisme bisa dilakukan melalui sebuah studi konteks politis dan historis yang mencakup skenario 'mentransformasi "terorisme" ke dalam suatu alat analitis yang bermanfaat daripada sebagai suatu alat polemik' (Crenshaw 1995; Whittaker 2004). Artinya bahwa terorisme itu sendiri dijadikan sebagai alat analisa daripada memperdebatkan pengertian dari terorisme. Meskipun demikian beberapa karakteristik umum dari berbagai definisi terorisme yang ada bisa diidentifikasi dan dianalisis. Jika demikian, apa yang mengkonstruksi makna terorisme? Apa yang membedakan terorisme dari peperangan atau tindakan kriminal biasa? Misalnya mengapa media massa menyebut pemboman terhadap Atlanta Olympic Park pada saat Olimpiade 1996 sebagai aksi terorisme, sedangkan pemboman klinik aborsi dan pembunuhan pemiliknya dianggap sebagai 'aksi kriminal'?

Penggunaan konsep terorisme telah mengalami perubahan beberapa kali seiring dengan perjalanan waktu. Dalam hubungannya dengan konteks historis, definisi terorisme hanyalah benar-benar dapat dimengerti, menurut Crenshaw, jika konteks dari waktu dan tempat yang melingkupi definisi juga diperhitungkan (Whittaker 2004).

Menurut sejarah, kata 'terorisme' berasal dari

rezim teror -atau apa yang disebut Nacos (2002) sebagai tindakan-tindakan kekerasan dari negara – yang terjadi segera sesudah Revolusi Prancis pada tahun 1790-an. Selama periode ini, terorisme diartikan sebagai hukuman mati massal bagi bangsawan dan musuh nyata atau yang diduga sebagai musuh negara. Pada abad ke-19, konsep terorisme mengalami perluasan makna dan mulai memasukkan tindakan-tindakan kejam dari tingkatan bawah, seperti pembunuhan politikus terkemuka oleh penganut paham anarkhi. Pada abad ke-20, terorisme sebagian besar dipahami sebagai kekerasan politis yang dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok atau individu independen maupun yang dibiayai negara (Vetter dan Pearlstein; Hoffman 1998).

Kebanyakan aksi terorisme dimaksudkan untuk mencapai tujuan politis. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, misalnya, pada kasus bom Bali pada tahun 2002 yang diduga dilakukan oleh kelompok Jemaah Islamiyah. Tujuan aksi teror ini adalah untuk melakukan balas dendam terhadap pemerintahan negara Barat yang dianggap telah menjajah dan berlaku tidak adil terhadap umat Islam. Kelompok ini telah menggunakan nilai-nilai Islam seperti jihad untuk membenarkan tindakan teror yang dilakukan. Bagi dunia internasional, serangan terhadap tempat peristirahatan wisatawan di mana banyak orang asing datang dari luar negeri menghabiskan waktu berlibur mereka, terutama dari negara-negara Barat, menandakan perasaan tidak suka kelompok ini yang mengklaim bahwa 'Barat' telah menindas Islam atau umat Muslim. Kelompok radikal ini mengklaim globalisasi dan kapitalisme merupakan bentuk baru kolonisasi yang disponsori oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara dunia ketiga dan Muslim.

Pada waktu bersamaan, bagi pemerintah Indonesia, serangan ini merepresentasikan suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal untuk secara politis mendorong pemerintah merubah sistem pemerintahan yang dianggap sekuler menjadi sistem pemerintahan Islam dan

penerapan hukum Syari'ah dengan berdasar pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Meski demikian, aksi teror ini perlu diperdebatkan karena mereka menggunakan pendekatan kekerasan yang juga berdampak pada hilangnya nyawa umat Islam lain dan melanggar etika yang diajarkan didalam al-Quran, kalaulah tindakan mereka bisa dianggap sebagai jihad.

Tujuan politis aksi terorisme menjadi salah satu karakteristik yang mengkonstruksi konsep terorisme itu sendiri. David J. Whittaker, dalam upayanya untuk menyajikan beberapa kriteria terorisme, menyatakan bahwa,

Terorisme adalah suatu yang direncanakan, penggunaan metode kekerasan yang dimotivasi secara politis atau ancaman yang bersifat segera atau menekan suatu pemerintah dari kalayak ramai;... kekuasaan secara intrinsik berada pada akar kekerasan politis – pencapaian, manipulasi dan implementasi untuk mempengaruhi perubahan;... tujuan secara umum bisa bersifat politis, sosial, ideologis, atau religius, jika tidak teroris akan dipahami semata sebagai kriminal (2004:1-2).

Horgan (2005) juga menyatakan bahwa terorisme meliputi penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan dalam konteks politis. Banyak kelompok teroris seperti *Basque Fatherland and Liberty* (ETA) dan *Red Army Faction* (RAF) dibentuk untuk mencapai sasaran politis. ETA, misalnya, menentukan kebebasan dan Marxisme sebagai prinsip organisasinya. Organisasi ini menentang dan menekan pemerintah Spanyol melalui tindakan teror. ETA juga melakukan sabotase terhadap pemerintah propinsi Basque dengan menciptakan krisis dan teror ekonomi di dalam propinsi tersebut. Dengan demikian, secara politis tindakan terorisme adalah menyebar teror untuk menindas atau menyerang pemerintah tertentu.

Pelaku terorisme bisa individu seperti pada kasus Timothy McVeigh yang membom gedung federal di kota Oklahoma, Amerika Serikat;

kelompok seperti Jemaah Islamiyah yang bertanggung jawab terhadap beberapa kasus pemboman di Bali dan Jakarta; dan bisa jadi berupa negara seperti Libya yang mensponsori Popular Front for the Liberation of Palestine yang dituduh melakukan pemboman pesawat Pan Am Flight 103 pada tahun 1988.

Makna terorisme juga dikonstruksi secara sosial. Dalam hal ini, terorisme terpisah dan berbeda dari pembunuhan, serangan, kejahatan dengan pembakaran, penghancuran properti, atau ancaman dari sesama, terutama karena dampak dari kekerasan atau kekejaman teroris dan kehancurannya menjangkau lebih dari sekedar korban antara (Tuman 2003). Dalam banyak kasus, korban-korban antara yang disetulisikan oleh tindakan kekerasan merupakan media bagi teroris untuk menyampaikan pesan mereka pada pemerintah yang berkuasa atau negara.

Singkatnya, definisi terorisme berkembang dalam sebuah proses kultural di mana interaksi simbolik antara teroris, aksi kekerasan, korban sebagai target antara dan badan-badan pemerintah berlangsung. Hubungan yang dinamis diantara masing-masing unsur yang terjadi pada tempat dan waktu yang berbeda membentuk beragam definisi dan makna terorisme.

Karena telah banyak upaya untuk mendefinisikan makna terorisme, beberapa analisis terorisme berupaya untuk menyatukan makna terorisme dengan mengamati dan menganalisa beberapa peristiwa terorisme. Brian Jenkins, yang bekerja sebagai konsultan terorisme dan keamanan kontra terorisme, memberikan beberapa hal mendasar dan sederhana definisi terorisme. Ia mengusulkan bahwa *terorisme adalah penggunaan kekuatan mengancam yang dirancang untuk membawa suatu perubahan politis*. Sebagian orang menyukai definisi Jenkins karena mereka menemukan kenyamanan dan keluasan dalam kesederhanaan definisinya - karena terorisme di lihat sebagai kekerasan politis – terlepas dari motif yang lain, dan dengan tak mengindahkan sifat alami target

kekerasan (warganegara, penegak hukum, atau personil militer) atau pelaku aksi teror (apakah perorangan, kelompok, atau negara) (Tuman 2003). Terlepas dari kesederhanaannya, definisi Jenkins memberi penafsiran luas kepada mereka yang tertarik menggunakan konsep tersebut. Misalnya, dengan tidak membatasi dan dengan jelas mengidentifikasi siapa pelaku tindakan teror, orang bisa mengklaim bahwa negara juga bisa menjadi teroris, sebagaimana dikatakan oleh Nacos (2002) dan Tuman (2003) di atas.

Bandingkan definisi tersebut dengan definisi dari Martha Crenshaw yang menyatakan bahwa,

Terorisme adalah sebuah gaya kekerasan konspirasional yang telah diperhitungkan untuk mengubah sikap dan perilaku orang banyak. Terorisme menjadikan sebagian orang sebagai target representasi dari banyak orang. Terorisme bukanlah kekerasan kolektif atau massa, tetapi lebih merupakan aktivitas langsung beberapa kelompok kecil (dalam Tuman 2003).

Definisi Crenshaw menyangkal kemungkinan keterlibatan negara atau individu dapat melakukan tindakan teror sebagaimana ditunjukkan oleh Libya yang mendukung pemboman Pan Am Flight 105 dan Timothy McVeigh yang membom gedung federal di kota Oklahoma. Meskipun demikian, kesederhanaan definisi Jenkins juga menjadi kelemahan karena mengundang perdebatan perihal apa yang membentuk sifat politis konsep ini. Isu lainnya juga bagaimana caranya mengklasifikasikan kekerasan yang melibatkan aksi terorisme.

Pemerintah Indonesia, pasca peristiwa bom Bali, mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terrorisme No. 16/2003. Pasal 6 undang-undang ini mendefinisikan tindakan terorisme sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terorkibatkan atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional...

Yang menarik, undang-undang ini oleh pemerintah ditetapkan berlaku surut hingga peristiwa bom Bali yang meledak pada tanggal 12 Oktober 2002. Tujuannya adalah untuk menjadi dasar hukum bagi pengadilan Indonesia dalam mengadilipara pelaku bom Bali tersebut.

Makna terorisme yang lain diberikan oleh A. P. Schmid, yang mengidentifikasi beberapa definisi dan menyimpulkan beberapa karakteristik yang membentuk konsep terorisme. Schmid menawarkan definisi komprehensif terorisme sebagai berikut:

Terorisme adalah sebuah aksi kekerasan berulang, yang dilakukan oleh individu atau kelompok bawah tanah, atau aktor negara, untuk alasan politis, dengan mana – berbeda dengan pembunuhan – target langsung dari aksi terorisme bukanlah target utama. Manusia sebagai target antara dari aksi terorisme dipilih secara acak (target peluang) atau selektif (perwakilan atau target simbolis) dari suatu populasi target, dan bertindak sebagai generator pesan. Ancaman dan proses komunikasi berbasis kekerasan antara teroris (organisasi), korban-korban (yang diancam), dan target utama digunakan untuk memanipulasi target utama, menjadikannya sebagai sebuah target teror, suatu target tuntutan, atau suatu target perhatian, tergantung pada apakah intimidasi, paksaan, atau propaganda merupakan hal utama yang dicari (dalam Horgan 2005).

Dalam hal alasan dari tindakan terorisme, definisi Schmid serupa dengan definisi yang diberikan oleh Whittaker (2004) dan Horgan (2005) yang merekomendasikan kita untuk mendefinisikan makna terorisme dalam hubungannya dengan metode yang digunakan untuk lebih dari sekedar alasan 'politis'. Alasan aksi terorisme bisa jadi bersifat politis, ideologis, religius atau sosial. Definisi Schmid juga mengakui adanya beragam



aktor terorisme, yang juga mencakup negara dan aktor tunggal.

Dalam hubungannya dengan para aktor terorisme, Walter Laquer (1987) mengklaim bahwa terorisme juga dapat dilakukan oleh badan negara dan negara itu sendiri. Ia menggolongkan terorisme menjadi dua: terorisme *top-down* dan *bottom-up*. Di dalam konteks ini, adalah mungkin menyatakan aktivitas badan atau agensi negara seperti serangan CIA dan keterlibatannya dalam proses politik di Nicaragua, Sudan dan di berbagai bagian Timur Tengah itu tidaklah berbeda dengan aktivitas nasional dan organisasi-organisasi teroris internasional yang disponsori oleh negara yang spesifik seperti Libya, Taliban Afghanistan dan Saudi Arabia (Lewis 2005).

Schmid juga menekankan bagaimana korban, yang biasanya bukan target utama, menjadi instrumen untuk meningkatkan rasa takut dari aksi teror kepada target utama, yang biasanya pemerintah dari suatu negara atau kelompok. Di dalam konteks ini, terorisme dapat juga dilihat sebagai suatu proses komunikasi di mana kelompok teroris mengirimkan pesan-pesan mereka melalui tindakan kekerasan yang mereka sebar.

Jika dibandingkan dengan definisi Jenkins yang terkenal dengan kesederhanaannya, definisi Schmid lebih kompleks dan komprehensif. Di dalam definisi terorisme ini, Schmid dengan jelas menyatakan apa yang ia maksud dengan terorisme, mempertimbangkan tujuan yang mencakup teror, tuntutan, dan perhatian. Definisi ini juga mencermati cara untuk mencapai tujuan, apakah melalui intimidasi, koersi atau propaganda (Tuman 2003). Untuk tujuan penulisan buku ini, definisi Schmid dianggap lebih relevan karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan isu terorisme yang dihadapi.

Berdasarkan pemahaman konsep terorisme diatas, bagaimana sesungguhnya memahami fenomena adanya kelompok Islam radikal yang menggunakan metode kekerasan untuk melancarkan aksi teror dalam rangka mencapai

tujuan politiknya menjadi menarik untuk dianalisis. Suka atau tidak suka, fakta bahwa ada kelompok Islam radikal yang mengatasnamakan Islam menyebar teror dengan dalih menegakkan jihad harus diakui.

Bagian berikut menganalisis definisi Islam dan Islamisme yang berkembang dikalangan analisis Barat. Satu hal penting yang coba ditegaskan adalah bahwa sesungguhnya nilai-nilai ajaran dan aktivitas Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

### Memahami Islam

Harus diakui bahwa serangan teroris 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat dan pemboman di Bali dan Jakarta sejak 2002-2005 telah mengangkat isu Islam dan konsep jihad dalam Islam ke permukaan. Banyak orang percaya bahwa konsep jihad memberi kontribusi pada radikalisme dalam Islam yang melegitimasi penggunaan kekerasan terhadap orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Lebih jauh, temuan sementara tim investigasi pemerintah Amerika yang menyatakan bahwa teroris yang menyerang New York dan Pentagon adalah kelompok teroris Islam Al-Qaeda memberikan kontribusi bagi pencitraan dunia terhadap Islam.

Jaringan media global, melalui peliputan mereka yang luas, juga memberikan kontribusi bagi terciptanya 'ketakutan' terhadap Islam atau Islamophobia. Penggunaan istilah 'teroris Muslim' atau 'Islam radikal' dalam media Barat telah membentuk citra di benak publik seolah-olah Islam identik dengan kekerasan dan esktrisme.

Sementara itu, fakta masih terjadinya konflik dan perang di beberapa negara Islam seperti di Iraq dan Iran telah memperparah kondisi ini. Banyak Muslim yang hidup di negara-negara Barat, dimana mereka menjadi kelompok minoritas, mengalami tindak kekerasan oleh kelompok agama atau sosial pasca serangan 11 September. Bom Bali dan beberapa serangan teroris yang

terjadi kemudian, yang dilakukan oleh kelompok radikal yang mengklaim tindakan mereka atas nama Islam, agaknya ikut memperkuat persepsi negatif dunia terhadap Islam.

Meskipun demikian, dalam hubungannya dengan Indonesia dan lebih luasnya dunia Muslim, terlalu banyak komentar di media mengenai terorisme dan Islam yang cenderung menyederhanakan dan mengeneralisir persoalan. Upaya untuk memahami semua isu ini seharusnya memerlukan pendekatan interdisipliner yang menempatkan isu dalam konteks sosial, politik dan kultural yang lebih luas.

Banyak pemahaman mengenai Islam berasal dari kaum orientalis dan misionaris Kristen dan ahli yang mendasarkan semata pada teks, yang mana keilmuan mereka tidak dikembangkan dengan pertimbangan sosial dan politik serta aplikasi dunia nyata dari dokumen yang mereka pelajari. Pada saat yang sama, sangat sedikit ilmuwan politik dan komentator yang memiliki pengetahuan agama yang dalam sesuai dengan kelompok yang mereka amati, seringkali partai politik dan kelompok yang berhubungan dengan Islam berpolemik satu sama lain.

Salah satu pandangan yang membentuk pengertian orang-orang terhadap Islam adalah disertasi Samuel Huntington tentang "benturan peradaban". Pandangan yang menyatakan seluruh dunia Muslim sebagai suatu kesatuan yang tunggal, dan sebagai satu masalah telah membuat Muslim menjadi target. Sejak berakhirnya perang dingin dan kejatuhan negeri Uni Soviet, pemerintah AS melihat peradaban Islam sebagai suatu ancaman baru terhadap Amerika dan negara-negara Eropa lain, yang mewakili kepentingan Barat. Kondisi ini membuat pemahaman terhadap Islam hanya di permukaan saja. Islam hanya dilihat sebagai kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan norma. Yang menjadikan kondisi ini lebih buruk adalah orang telah salah memahami Islam dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan; dan memberi label Islam sebagai agama radikal; dan memperlakukan Islam sebagai ajaran yang penuh dengan aksi-

aksi kekerasan. Mereka, misalnya, menyatakan bahwa Islam disebarkan melalui peperangan. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, menjadi penting untuk mengetahui beberapa konsep terkait seperti Islam dan ajaran Islam (Islamisme). Khusus konsep jihad, harus dilihat sebagai konsep yang telah dipersepsikeliru oleh sebagian pihak, akan dibahas tersendiri pada tulisan berikutnya.

Kata Arab 'Islam' secara sederhana berarti 'penyerahan', dan berasal dari makna kata 'damai'. Dalam konteks religius kata ini berarti 'penyerahan menyeluruh kepada Kehendak Allah'. Orang yang memeluk agama Islam disebut 'Muslim'. Agama Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang pada usia 40 tahun mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah yang disampaikan melalui Malaikat Jibril. Wahyu, yang diturunkan dalam waktu 23 tahun lamanya, dikenal sebagai Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber pedoman hidup utama bagi setiap Muslim. Sunnah atau sering juga disebut hadis yang berisi ucapan, tindakan dan perilaku Nabi Muhammad, adalah sumber utama kedua bagi Muslim. Percaya terhadap Sunnah merupakan bagian dari kepercayaan dalam Islam. Beberapa analis Barat menyebut Islam dengan 'Muhammadanism' karena disebarkan oleh Nabi Muhammad. Istilah ini tidak tepat, tendensius, dan menyesatkan karena menyatakan bahwa Muslim menyembah Muhammad dan bukannya Allah. Barton (2004) mengidentifikasi Islam sebagai keseluruhan pedoman norma sosial, kultural dan politik, pengharapan, nilai, tradisi, penampilan, sikap dan penanda identitas.

Islam meliputi beragam praktek keagamaan. Penganut agama Islam (Muslim) didwajibkan menunaikan rukun Islam yang meliputi lima pilar yang menyatukan Muslim kedalam sebuah komunitas (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu). Selain rukun Islam, hukum Islam (Shari'a) merupakan aturan yang menata segala aspek kehidupan dan kemasyarakatan, mulai dari hukum yang mengatur masalah makanan yang

boleh dikonsumsi, perbankan, kekayaan dan kesejahteraan.

Islamisme, yang sama dengan "Aktivitas Islam", didefinisikan sebagai pernyataan dan dukungan terhadap kepercayaan, arahan, aturan, atau kebijakan yang dianggap memiliki karakter ke-Islam-an (ICG Report No. 37, 2005). Dibandingkan dengan terminologi seperti "fundamentalis Islam" dan "Islam Radikal", istilah ini lebih bisa diterima, walau masih bisa diperdebatkan. Islamisme mencakup spektrum yang luas dari keyakinan. Pada satu sisi adalah mereka yang cenderung melihat Islam sesuai dengan pengakuan dalam kehidupan nasional dalam kaitannya dengan simbol-simbol nasional. Di sisi lain adalah mereka yang ingin melihat perubahan radikal masyarakat dan politik, dengan cara apapun juga, ke dalam satu teokrasi yang absolut (Barton 2004).

Wacana yang berkembang di dalam benak analis dan pembuat kebijakan negara-negara Barat cenderung mengklasifikasikan aktifitas Islam ke dalam dua karakteristik utama. Pertama, aktifitas Islam dilihat sebagai suatu kepercayaan personal dan tidak berhubungan dengan aktifitas politik. Biasanya diberi label "Islam". Kedua, aktifitas Islam yang dilihat sebagai kepercayaan dan politik, yang diberi label "Islamisme" atau "Islam politik". "Islam Politik" digunakan untuk memahami bagaimana beberapa kelompok minoritas Islam memanfaatkan agama untuk tujuan politis, yang oleh beberapa negara Barat dan Muslim dianggap sebagai masalah.

Menurut Barton (2004), Islamisme merupakan respon terhadap modernitas yang mentransformasi agama Islam ke dalam sebuah ideologi politik. Islamisme berkaitan dengan mengubah masyarakat dan institusi politik agar sesuai dengan pemahaman Islam. Di antaranya, hal ini berupa pengakuan formal terhadap Islam, dimana bagi kelompok Islam radikal meliputi memperkenalkan hukum Shari'a dan pembentukan negara Islam.

Pembagian Islam kedalam dua kategori

agaknyanya terlalu menyederhanakan isu dan menyesatkan karena beberapa hal. *Pertama*, jika Islam dikatakan hanya masalah kepercayaan pribadi, pada waktu yang sama kita juga sebenarnya mengatakan bahwa Islam berhubungan dengan isu politik. Seorang Muslim selalu menempatkan agama pada posisi paling atas di dalam pikiran mereka, dan tidak memisahkan antara hal-hal agama dan praktek duniawi. Mereka percaya bahwa Hukum Allah, Sharia, harus diperhatikan dengan sangat serius. Dengan demikian, Islam juga dikenal sebagai agama hukum. Dalam konteks ini, umat Muslim harus mengadopsi dan menerapkan semua ajaran Islam di dalam semua aspek kehidupan, termasuk sosial dan politik. Surah ke-4 dari Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 53 dan 58 sebagai contoh, menjelaskan pondasi pemerintahan dalam Islam:

Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan) ? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia (Ayat 53).

Maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang tidak dapat memberikan kebaikan kepada manusia atau masyarakatnya, tidak selayaknya ikut memegang jabatan dalam pemerintahan.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Ayat 58).

*Kedua*, untuk menyatakan "Muslim" sebagai suatu bentuk dari kepercayaan religius yang pada intinya merupakan masalah pribadi menjadi tidak realistis. Akan menjadi lebih akurat untuk mengatakan bahwa, bagi mayoritas Muslim, Islam pada hakekatnya merupakan masalah publik, dimana tidak hanya memberi saran bagi pemeluknya, tetapi juga berisi dan menyampaikan sekumpulan pedoman hukum dan moral, dan oleh karena itu merupakan "cetakbiru atau pedoman



dari suatu tatanan sosial” (ICG Report No 37, 2005).

*Ketiga*, istilah “Islam politis” yang diperkenalkan oleh Amerika pasca revolusi Iran pada tahun 1979 cenderung digunakan untuk kepentingan politik Barat. Jauh sebelum peristiwa ini, Islam merupakan agama yang telah dipolitisir. Hal ini didukung oleh fakta bagaimana kebijakan Barat, terutama dari awal tahun 1950an, yang cenderung mendukung dan mendorong satu aliansi negara-negara Muslim konservatif, dipimpin oleh Saudi Arabia dan Pakistan, sebagai upaya dalam mempromosikan suatu pan-Islamisme yang pro Barat untuk menghadapi nasionalisme Arab yang digagas oleh Nasser dan negara-negara yang bergabung didalamnya (Algeria, Iraq, Libya, Arab, Selatan Yemen) (ICG Report No 37, 2005). Dengan demikian, istilah “Islam politik” tidak memiliki dasar historis yang kuat dan pemerintah negara-negara Barat cenderung melihatnya dari sudut pandang kepentingan politik mereka semata.

Konsep “Islam politik” telah digunakan oleh analis politik dan pemerintah negara-negara Barat, terutama Amerika, untuk menjelaskan gerakan-gerakan yang cenderung bersifat reaktif dan menggunakan Islam sebagai sarana utama untuk menyerang kepentingan Barat. Konsep ini diterapkan untuk situasi di mana Islam menentang kebijakan-kebijakan Barat dan oleh karena itu dianggap sebagai suatu ancaman. Sebagai contoh misalnya, tesis Huntington yang pertama kali diterbitkan di Jurnal *Foreign Affairs* pada tahun 1993 dan kemudian diterbitkan menjadi buku pada tahun 1996 dengan judul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Pada awal tulisannya, Huntington menekankan,

Hipotesis saya adalah bahwa sumber pokok dari konflik di dalam dunia baru ini bukanlah masalah ideologi atau terutama ekonomi. Divisi-divisi yang besar antar umat manusia dan sumber konflik dominan adalah kultural. Negara bangsa akan menjadi aktor paling kuat di dalam urusan dunia, konflik prinsipal dari politik global akan terjadi antara negara-

negara dan kelompok-kelompok yang berbeda peradaban. Konflik atau benturan peradaban akan mendominasi politik global. Batasan-batasan kesalahan antara peradaban akan menjadi batas pertikaian di masa depan.

Sebagai seorang profesor dari Olin Institute dan mantan penasihat pemerintahan Amerika pada perang Vietnam, sangat mungkin Huntington cenderung mendukung kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat. Bagi Huntington, peradaban-peradaban ini ditandai oleh bahasa yang sama, sejarah, agama, kebiasaan, nilai-nilai, dan institusi dan moda identifikasi diri yang berbeda. Dalam sebuah teleologi pesimistik, Huntington menguraikan secara singkat alasan mengapa peradaban-peradaban akan berbenturan, dengan memfokuskan terutama pada isu perbedaan kultural dan fundamental yang tidak dapat direduksi. Perbedaan-perbedaan ini berlangsung dalam suatu konteks persaingan internasional untuk sumber daya ekonomi, dan suatu ketaatan mendalam pada agama dan perlawanan terhadap keunggulan dunia Barat (Lewis, 2005).

Di dalam tesisnya, ia menyebutkan bahwa karena permasalahan ideologi, politik dan ekonomi dikendalikan oleh negara-negara Barat, maka perlu untuk memfokuskan pada peradaban-peradaban yang bukan berasal dari Barat sebagai musuh bersama (*common enemy*). Musuh bersama ini bukanlah negara, melainkan peradaban-peradaban itu sendiri. Dalam hubungannya dengan isu ini, Huntington melihat Islam dan Konfusianisme sebagai peradaban-peradaban yang muncul menentang kepentingan, nilai-nilai, dan keunggulan Barat. Islam sebagai sebuah peradaban merupakan suatu kekuatan politik yang mengancam kepentingan-kepentingan politik global pemerintahan negara-negara Barat. Konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iraq dan Kuwait, beberapa negara bekas Soviet Union dan bekas negeri Yugoslavia menjadi bukti untuk membenarkan tesis Huntington mengenai benturan peradaban (Bustamam-Ahmad, 2003). Setelah tumbangannya negara Soviet Union, kebijakan-kebijakan luar

negeri pemerintah negara-negara Barat (Amerika), mengidentifikasi Islam sebagai ancaman baru terhadap demokrasi Barat. Dalam bahasa Lewis,

Politik luar negeri, termasuk bantuan, kebijakan pembangunan dan keamanan, harus difokuskan di sekitar pembelaan diri dan sasaran civilisasi. Keunggulan Barat harus dilihat sebagai suatu kondisi tidak stabil dan oleh karena itu harus dilindungi dengan cara apapun dari orang-orang yang mencari untuk menghancurkannya' (2005:59).

Pada dasarnya, tesis Huntington merupakan produk dari proyek Olin Institute dengan nama "*The Changing Security Environment and American National Interests*". Jadi, tesis ini dikembangkan untuk menjadi dasar pertimbangan pemerintah Amerika dalam membuat kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan isu-isu keamanan dan kepentingan nasional. Menurut Huntington, berkembangnya populasi Muslim, kebangkitan Islam, keunggulan ekonomi berkelanjutan negara-negara Barat, dan tumbangannya komunisme dan perasaan baru terhadap identitas karena meningkatnya kontak antara Muslim dan orang-orang Barat dipercaya menjadi penyetulisan perselisihan antara Islam dan Barat.

Dalam hal ini, tesis Huntington menunjukkan bagaimana analisis politik Barat melihat Islam secara politis ketika Islam mengancam kepentingan dari pemerintah negara-negara Barat. Bernard Lewis, seorang akademisi yang menulis artikel "*The roots of Muslim Rage*" (1990), memberikan penekanan bagaimana sejarah Muslim dan Islam harus diperhitungkan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ia, misalnya, mengklaim bahwa krisis Islam dikarenakan oleh sifat negara Islam dan agama yang pada prinsipnya tidak sesuai dengan modernisasi dan oleh karenanya mendesak pemisahan antara negara dan agama. Lewis memperingatkan bagaimana agama telah menjadi landasan bagi tindakan-tindakan politis dari sebagian orang Muslim, termasuk ekstrimis-ekstrimis seperti Osama bin Laden.

Harus diakui bahwa peristiwa 11 September tidak hanya membawa isu perubahan paradigma 'keamanan dan ancaman nasional' ke permukaan, terutama bagi pemerintahan George Bush dan sekutunya; peristiwa ini juga telah menciptakan dua fenomena yang mewarnai situasi politik internasional sejak 2001 (Sihbudi, 2006). *Pertama*, deklarasi 'perang terhadap terorisme' oleh pemerintah Bush setelah peristiwa 11 September telah meningkatkan ketegangan hubungan antara Amerika Serikat (Pemerintahan Bush) dengan negara-negara Muslim. Ketegangan ini dipicu oleh fakta bahwa dua negara (Afghanistan dan Iraq) yang menjadi korban dari pembalasan pemerintah Bush adalah negara-negara Muslim. Lebih dari itu, pemerintah Bush cenderung untuk menyamaratakan kelompok Islam fundamentalis atau radikal dengan kelompok teroris. Melalui berbagai kebijakan luar negerinya, pemerintahan Bush dengan tanpa ragu menekan para pemimpin negara lain untuk menekan kelompok-kelompok Islam ini. Akibatnya, beberapa ketegangan muncul antara para pemimpin yang sekuler dan kelompok aktivis Islam, seperti pada beberapa kasus di Indonesia dan Pakistan.

*Kedua*, ketegangan organisasi di bawah pimpinan Amerika Serikat sendiri yang menguat terutama setelah pendudukan Iraq. Peristiwa ini telah memperlemah kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di mata masyarakat internasional. Lebih jauh, organisasi ini telah menjadi ancaman terhadap negara-negara yang lemah. Pemerintahan Bush telah mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia – sebuah isu yang negara-negara dan masyarakat Barat selalu junjung tinggi – dalam memburu para teroris. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Bush, terutama setelah peristiwa September 11, telah meligitasi tesis Huntington mengenai benturan peradaban.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua analisis politik, termasuk mereka yang berasal dari negara-negara Barat, setuju dengan tesis Huntington. Di antara analisis-politik tersebut adalah Noam Chomsky, Donald K.

Emmerson, dan Jeane J. Kirkpatrick. Emmerson, misalnya, mengkritisi bagaimana Huntington telah menyalahgunakan istilah 'peradaban' (*civilization*) untuk menjelaskan lokasi, ajaran, etnisitas, negara, agama dan benua.

Yang menjadi masalah dari perspektif ini dan berkembang dalam pikiran para pembuat kebijakan negara Barat adalah adanya salah satu pertimbangan yang dipicu oleh beberapa kelompok minoritas di dalam masyarakat Muslim yang menjadi ideologi ekstrimis dan taktik kekerasan sebagai pedoman dalam rangka menentang baik pemerintahan negara-negara Barat maupun negara-negara Muslim yang dianggap mendukung dan atau dikuasai oleh negara-negara Barat. Penentu kebijakan ini cenderung mengabaikan alasan mengapa kelompok minoritas radikal ini menggunakan metoda kekerasan untuk mencapai sasaran mereka. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya menegakkan nilai-nilai dan demokrasi Barat dan bagaimana konsep dari demokrasi dan nilai-nilai ini diterima oleh peradaban-peradaban lain, termasuk Islam.

Dengan demikian, pada prinsipnya dikotomi antara "Islam" atau "fundamentalisme Islam" dan "Islamisme" atau "Islam politik" secara internal tidak ada perbedaan sama sekali dari berbagai aspek praktis. Dan oleh karenanya mengabaikan keanekaragaman pandangan, tujuan dan metode yang sebenarnya dapat dijumpai dalam aktivitas Islam. Sebaliknya, dapat dikemukakan sebuah dikotomi sederhana di dalam suatu kategori yang monolitik menjadi antara "radikal" dan "moderat" (ICG Report No 37, 2005). Dikotomi ini digunakan untuk menjelaskan kelompok Muslim yang bisa dan tidak bisa diajak kerjasama oleh pemerintah-pemerintah Barat.

Islam "Moderat" adalah mereka yang memeluk Islam sebagai kepercayaan pribadi dan percaya bahwa Islam harus diimplementasikan di dalam setiap aspek kehidupan, namun pada saat bersamaan juga terbuka dan menghargai kepercayaan dan peradaban lain. Pemerintah negara-negara Barat senang bekerja sama dengan

kelompok Islam ini.

Sedangkan Islam "Radikal" adalah mereka yang memegang kepercayaan mereka dengan sungguh-sungguh dan tidak bisa dibeli. Mereka menekankan pentingnya implementasi hukum Shari'a atau Islam sebagai solusi mujarab bagi penyakit sosial masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa semua kelompok Islam radikal adalah teroris. Jika pemahaman radikalisme dalam Islam dimaknai sebagai upaya kembali kepada ajaran murni Nabi Muhammad dan upaya untuk mengimplementasikan ajaran Al-Quran di dalam semua aspek kehidupan, maka radikalisme tidak dengan serta merta menjadi buruk.

Dalam konteks Indonesia, ada kelompok-kelompok Islam yang radikal hanya dari sisi pemikiran atau kelompok; dan mereka yang radikal baik dalam pemikiran juga perilaku. Kelompok radikal yang terakhir bahkan masih dapat digolongkan ke dalam mereka yang radikal dari sisi perilaku tetapi tidak menggunakan aksi teror atau membunuh orang lain dan tidak memiliki tujuan politis, namun semata-mata ingin menegakkan ajaran Islam; dan mereka yang menggunakan metode kekerasan untuk menyebar teror dalam rangka mencapai sasaran yang lebih luas seperti perubahan kebijakan politik.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dikotomi antara Islam dan Islamisme cenderung lemah. Argumentasi ini tidak kuat seperti ketika kita mendiskusikan baik Islam atau Islamisme, kedua konsep mengandung dimensi politis. Itu juga menandakan bagaimana konsep-konsep ini diadopsi oleh pemerintah negara-negara Barat untuk kepentingan politik. Jika demikian, bagaimana sesungguhnya Islam memandang aksi terorisme? Bagian berikut menganalisis bagaimana persepsi Islam terhadap terorisme.

### Islam dan Terorisme

Penafsiran kembali makna jihad oleh beberapa kelompok Islam radikal untuk membenarkan aksi-aksi teror yang mereka lakukan telah menimbulkan persepsi negatif dunia



internasional terhadap Islam. Dampak yang telah mereka ciptakan melalui aksi-aksi teror memang luar-biasa. Pada kasus bom Bali 2002, selain menelan korban jiwa, kerugian ekonomi dan citra Indonesia di mata dunia internasional yang menurun; peristiwa ini juga telah menurunkan citra politik Megawati sebagai presiden Republik Indonesia dan meningkatkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Menteri Politik, Hukum dan Keamanan pada saat itu. Yang menjadikan situasi lebih buruk adalah fakta bahwa ada beberapa pelaku yang menunjukkan sikap tidak bersalah atau penyesalan setelah ditangkap oleh pihak kepolisian. Imam Samudra dan Amrozi, keduanya merupakan Islamis radikal, adalah orang-orang yang membom dua klub malam di Bali dan ditangkap beberapa waktu kemudian. Dalam beberapa persidangan mereka, Imam Samudra selalu berteriak Allahu Akbar dan Amrozi selalu tersenyum tanpa penyesalan. Mereka mengklaim apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari jihad dan bahwa mereka cukup puas dengan hasil yang mereka capai. Jika Islam tidak mentolerir tindakan teror dengan menciptakan kekerasan terhadap orang lain, bagaimana Islam memandang isu terorisme? Bagaimana cara kita menjelaskan fakta bahwa serangan-serangan teroris terbaru kebanyakan berhubungan dengan para pelaku dengan latar belakang Islam?

Isi buku Imam Samudra – berjudul *Aku Melawan Teroris* - yang membenarkan tindakan teror yang dilakukannya dapat menyesatkan. Dalam bukunya, ia telah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk menciptakan opini publik seolah-olah jihad hanya semata-mata berhubungan dengan perang terhadap agama lain atau pemerintah negara-negara Barat. Ia telah mengesampingkan beberapa kondisi yang dijadikan prasyarat dari jihad seperti Ulama atau para pemimpin Islam harus menentukan kondisi untuk mengobarkan jihad, kapan jihad dilakukan dan siapa yang harus dilindungi di dalam perang jihad. Ada beberapa pernyataan dari Islamis radikal seperti Osama bin Laden dan Imam Samudra yang

cenderung menyebarkan teror untuk kepentingan mereka daripada demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Osama, misalnya, berkata bahwa jihad (dalam arti berperang) merupakan kewajiban bagi setiap Muslim pada waktu sekarang ini, sedangkan Imam Samudra berkata bahwa yang Muslim tidak mengikuti jihad dapat dibunuh karena mereka dapat dianggap kafir atau non-Muslim. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan seolah-olah Islam identik dengan kekerasan dan radikalisme.

Terlepas dari fakta bahwa ada kelompok Islam radikal yang melakukan teror atas nama Islam, terorisme sebagai salah satu bentuk kekerasan politik bertentangan dengan konsep kemanusiaan dalam Islam. Islam memperkenalkan dan menekankan konsep kemanusiaan yang universal (*al-ukhuwah al-insaniyyah*) yang menyarankan para pengikutnya untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan penghormatan seluruh umat manusia tanpa memperhatikan latar belakang dan agama mereka. Meskipun merupakan suatu keharusan bagi umat Muslim untuk menegakkan kebaikan dan mencegah yang mungkar (*amar ma'ruf nahi al-munkar*), penggunaan kekerasan - atau bahkan teror – merupakan tindakan kriminal (Azra, 2002:81). Ini juga bertentangan dengan ide Islam sebagai kemurahan hati Allah bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Dengan demikian, merupakan suatu kesimpulan yang tergesa-gesa dan cenderung tendensius ketika menghubungkan Islam dengan terorisme.

Ada tiga argumentasi untuk menjelaskan mengapa kesimpulan yang menyesatkan ini terjadi. *Pertama*, adalah konflik historis antara negara-negara Muslim dengan negara-negara Barat. Konflik ini muncul sebagai konsekuensi persaingan antara para pengkhotbah Muslim dengan para misionaris Kristen sebagai agama-agama yang paling besar pengikutnya di dunia. Selanjutnya, kedua belah pihak selalu berusaha mempengaruhi orang lain untuk menjadi bagian dari para pengikutnya. Pada tahap berikutnya, kondisi ini mengarah pada perang salib di mana

pengaruh Islam diperlemah. Ketika invasi militer Eropa meluas ke beberapa negara Arab, situasi ini menciptakan gerakan-gerakan nasional untuk berjuang melawan para penjajah. Dalam konteks ini, Islam memainkan peran penting dalam menumbuhkan dan memberi karakteristik religius kepada gerakan-gerakan ini. Pada waktu yang sama, kemurnian gerakan-gerakan ini senantiasa dipelihara beserta kemerdekaan dan kesadaran kultural dari masyarakat Arab.

Semua kondisi ini, menurut Misrawi dan Zada (2004), telah menciptakan satu pemahaman di dalam benak orang Eropa dan bahkan pemerintah negara-negara Barat bahwa Islam adalah musuh utama yang menciptakan permusuhan terhadap Barat. Stigmatisasi ini yang kemudian diperkuat dengan terbitnya buku Samuel Huntington *"The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order"* pada tahun 1996. Di dalam bukunya, Huntington menekankan fakta bahwa perang Afghanistan yang terjadi selama 1979 sampai 1989 adalah suatu perang peradaban karena melibatkan Muslim dari seluruh penjuru dunia untuk memerangi negara Uni Soviet pada saat itu.

Beberapa kelompok Islam fundamentalis dari Mesir, Syria, Yordania, Pakistan, Malaysia, Afghanistan, Sudan dan Indonesia menyebut kondisi ini sebagai peperangan terhadap 'Islam dan peradabannya'. Pengalaman bersatunya umat Islam kemudian dilihat sebagai ancaman bagi masa depan dari demokrasi Barat. Perang Afghanistan menyimbolisasikan semangat *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan Muslim universal yang kuat.

Isu krusial lainnya yang masih berhubungan dengan argumentasi pertama di atas adalah konflik Israel-Palestina. Di dalam konflik yang terbaru, pembunuhan para pemimpin HAMAS (*Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya*) Palestina, Syekh Yasin dan al-Rantisi telah memicu radikalisme dan militansi Muslim. Radikalisme ini kemudian membentuk karakter kelompok fundamentalis Islam yang anti Israel dan anti Amerika. Dalam konteks global, tekanan dan serangan

israel terhadap Palestina, yang didukung oleh pemerintah Amerika, dianggap sebagai ancaman terhadap Muslim. Kondisi ini bisa jadi telah memicu dan menumbuhkan semangat *ukhuwah Islamiyah* dan selanjutnya memunculkan panggilan untuk berjihad. Situasi ini diperparah dengan pencitraan Islam yang diidentikkan dengan terorisme melalui jaringan media global korporat Barat. Hal ini pada gilirannya memicu fundamentalisme Islam universal yang dalam beberapa bentuk menggunakan pendekatan kekerasan atau teror untuk mengkritik ketidakadilan atau tirani pemerintah negara-negara Barat. Dengan demikian, ada hubungan menguatnya fundamentalisme dan militansi dalam Islam dengan kebijakan luar negeri pemerintah negara-negara Barat terhadap Islam.

*Kedua* adalah kemunduran peradaban Islam karena agresi budaya Barat. Misrawi dan Zada (2004) menekankan bagaimana kapitalisme, sekularisme, sosialisme, individualisme, dan nasionalisme sebagai 'produk Barat' telah menghancurkan peradaban Islam di seluruh penjuru dunia. Banyak kaum muda Islam mengikuti jalan hidup Barat yang dalam beberapa bagian bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, jaringan media global yang dimiliki dan didominasi oleh korporasi-korporasi Barat memainkan peran penting dalam proses ini. Nilai-nilai Islam direduksi dan digantikan oleh nilai-nilai demokratis Barat, dengan cara memberi label nilai-nilai Islam tidak pantas atau tidak sesuai dalam konteks tatanan dunia internasional baru. Kondisi-kondisi ini pada gilirannya memaksa kelompok fundamentalis Islam untuk mendefinisikan kembali makna agama mereka. Mereka melihat kultur Barat sebagai suatu ancaman terhadap Islam dan segala usaha, termasuk menegakkan jihad, perlu dilakukan dalam menghentikan agresi kultural terhadap Islam. Kebencian terhadap kultur Barat telah menimbulkan sikap anti Barat.

*Ketiga* adalah kemunculan gerakan, partai atau kelompok yang menggunakan simbol

dan jargon Islam. Kelompok-kelompok ini melegalkan intimidasi fisik, termasuk kekerasan dan pembunuhan atas musuh ideologis dan politis mereka. Mereka hidup terpisah dari masyarakat umum dan memiliki norma-norma dan penafsiran sendiri terhadap teks Islam tanpa memperhatikan konteks. Perintah Islam untuk menegakkan kebaikan dan mencegah yang munkar (*amar ma'ruf nahi al-munkar*) ditafsirkan secara harfiah tanpa pemahaman konteks. Mereka cenderung menggunakan cara radikal dalam menerapkan perintah ini. Pada akhirnya, pemahaman dan perspektif agama mereka menjadi sempit, benar atau salah, Islam atau non-Islam (kafir). Mereka yang di luar Islam merupakan musuh yang harus diperangi, termasuk Yahudi, Barat dan Kristen. Bahkan dalam beberapa kelompok Islam radikal, Muslim yang tidak mengikuti pemahaman Islam berdasarkan interpretasi kelompok ini digolongkan sebagai non-Muslim (kafir). Itulah setulisannya Imam Samudra dan Amrozi, para terdakwa pelaku bom Bali, dan komandan militer Jemaah Islamiyah yang tertangkap pada Juni 2007, Abu Dujana, tidak pernah menyesali aksi-aksi teror mereka meskipun fakta menunjukkan bahwa aksi teror yang mereka lakukan juga telah membunuh umat Islam.

Bagi kelompok Islam radikal ini, demokrasi sangat tidak masuk akal dan merupakan bagian dari strategi pemerintah negara-negara Barat untuk memudahkan kapitalisme global yang pada akhirnya memperlemah posisi tawar umat Islam di dalam tatanan dunia internasional baru. Menurut Asmani, pada masa kini, umat Islam telah diidentifikasi sebagai kelompok marjinal, tertindas, dan menjadi target dari kebijakan pemerintah negara-negara Barat. Akibatnya, bagi beberapa kelompok radikal, tidak ada cara lain kecuali mengoptimalkan semua kekuatan Islam untuk memerangi ancaman musuh berdasarkan pada apa yang ditulis dalam Al-Quran dan Hadis (online, tanggal akses: 3 Maret 2006).

Gerakan-gerakan ini dan cara mereka dalam mencapai tujuan politis telah menciptakan

citra negatif terhadap Islam, meskipun ada fakta yang menunjukkan bahwa pada beberapa negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, mereka merupakan kelompok minoritas dari sisi jumlah. Pendirian mereka yang radikal di dalam memahami agama dan praktek menyetuliskan ditekannya kelompok-kelompok ini oleh pemerintah beberapa negara. Pada waktu yang sama, gerakan-gerakan mereka menjadi ancaman bagi pemerintah. Konsep *ukhuwah Islamiyah* mendorong beberapa gerakan radikal untuk membangun jaringan lintas negara dan mengambil keuntungan dari globalisasi dunia. Jemaah Islamiyah, sebagai kelompok yang dicurigai melakukan beberapa serangan teroris di Indonesia, memiliki jaringan di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina.

Singkatnya, ada hubungan setulisan akibat antara terorisme, Islam dan Barat. Penting kiranya untuk dipahami bahwa tidak ada agama di dunia yang merekomendasikan para pengikutnya untuk menggunakan kekerasan melawan orang lain. Islam sebagai agama tidak pernah menyarankan para pengikutnya untuk menjadi radikal. Islam menghargai pluralisme dan melihatnya sebagai anugerah daripada ancaman. Hal ini, misalnya, dinyatakan di dalam Al-Quran, Surah al-Hujurat, ayat 13 yang berbunyi,

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Meskipun demikian, adalah penting untuk memperhatikan bahwa radikalisme atau ekstrimisme dalam Islam muncul sebagai hasil tekanan dari pemerintah negara-negara barat dan sekuler dan penafsiran yang sempit terhadap nilai-nilai Islam.

Kemunculan beberapa kelompok radikal



yang menggunakan agama untuk mensahkan aksi-aksi teror mereka harus ditempatkan dalam konteks kultural, politik dan sosial. Upaya mereka untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan hukum Shari'a di beberapa negara, seperti kasus Indonesia, telah menimbulkan konflik dengan pemerintah sekuler. Sementara itu, karena garis keras dan penafsiran harafiah Islam berdasarkan pada Salafi Wahhabisme, kelompok-kelompok radikal ini dianggap sebagai ancaman bagi beberapa pemerintah. Di Indonesia, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, dua tokoh radikal yang dipercaya telah mendirikan Jemaah Islamiyah, ditangkap oleh rezim Suharto pada tahun 1978 dan dipenjarakan selama sembilan tahun karena melanggar undang-undang subversi tahun 1963. Sikap mereka yang kritis, radikal dan cenderung menentang pemerintah mendorong pemerintah untuk menekan para pemimpin Islam agar tidak memainkan peran dominan dalam politik. Dampaknya, beberapa pemimpin Islam radikal mencari cara untuk menyatakan sikap politik mereka, yang dalam beberapa kesempatan menggunakan pendekatan kekerasan.

Memerangi terorisme dengan aksi teror seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah Bush dengan menyerang Afghanistan dan Iraq hanya menghasilkan bentuk-bentuk baru terorisme, sementara inti dari permasalahan itu tidak akan pernah dikenali dan dipecahkan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk memerangi terorisme harus dimulai dari identifikasi inti permasalahan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan dan ketidakadilan di dalam tatanan dunia internasional di mana negara-negara Muslim telah menjadi target dari globalisasi Barat atas nama demokrasi. Situasi ini pada gilirannya memicu pembalasan dari beberapa kelompok Islam radikal. Dengan demikian, perlu adanya pengakuan peran negara-negara Muslim di dalam dunia global.

Untuk kasus Indonesia, tertangkapnya para pelaku bom Bali seperti Imam Samudra dan Amrozi tidak secara otomatis menghentikan serangan teroris. Pemboman Hotel J. W. Marriott

dan Kedutaan Besar Australia merupakan contoh perlawanan kelompok Islam radikal terhadap negara Barat, meski dilakukan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Penyelidikan atas kasus-kasus ini mengungkapkan fakta bahwa salah satu motivasi kuat untuk melakukan tindakan-tindakan teror ini adalah untuk memerangi ketidakseimbangan dan tekanan-tekanan dari pemerintah-pemerintah sekuler dan Barat. Kondisi ini, seperti dikemukakan oleh Ansyad Mbai, telah membentuk karakteristik psikologis dari para teroris.

Juga, pengingkaran keterlibatan Muslim di dalam politik telah memarginalkan kelompok Islam tertentu yang kemudian mengambil tindakan radikal untuk menyatakan eksistensi mereka. Kemunculan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Filipina, Parti Islam seMalaysia (PAS) di Malaysia dan Darul Islam dan Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia mencerminkan kondisi ini. Situasi termarginalisasi dan tertindas merupakan kondisi yang baik bagi radikalisme dan esktrimisme untuk berkembang. Dengan demikian, sangat penting bagi tatanan dunia internasional baru untuk memberi lebih banyak peluang dan peran kepada Muslim dan negara-negara Islam. Jika isu-isu keadilan dan persamaan antar negara-negara dan kelompok-kelompok diciptakan, maka perdamaian akan dapat dicapai. Sebagaimana dikatakan oleh Azra (2002),

Hanya melalui penciptaan tatanan dunia internasional yang adil dan jujur - dan kemudian menciptakan perdamaian - yang mengakui hak-hak masyarakat dan bangsa, yang menghargai pluralisme dan multikulturalisme, maka terorisme dapat dikurangi, jika tidak bisa dihilangkan sama sekali.

## Kesimpulan

Pendefinisian konsep terorisme telah mengalami evolusi seiring dengan konteks kultural sosial, dan politik. Masing-masing analisis, institusi dan pemerintah tiap-tiap negara memiliki cara, konsep dan kepentingan sendiri dalam memaknai

konsep terorisme. Konsep terorisme sendiri oleh beberapa negara telah disalahgunakan untuk memberi label 'teroris' pada beberapa kelompok Islam radikal dan oleh karenanya menjadi dasar untuk melakukan aksi dalam rangka menumpas kelompok yang dianggap teroris ini.

Terorisme adalah sebuah aksi kekerasan berulang, yang dilakukan oleh individu atau kelompok bawah tanah, atau aktor negara, untuk alasan politis, dengan mana – berbeda dengan pembunuhan - target langsung dari aksi terorisme bukanlah target utama. Manusia sebagai target antara dari aksi terorisme dipilih secara acak (target peluang) atau selektif (perwakilan atau target simbolis) dari suatu populasi target, dan bertindak sebagai generator pesan. Ancaman dan proses komunikasi berbasis kekerasan antara teroris (organisasi), korban-korban (yang diancam), dan target utama digunakan untuk memanipulasi target utama, menjadikannya sebagai sebuah target teror, suatu target tuntutan, atau suatu target perhatian, tergantung pada apakah intimidasi, paksaan, atau propaganda merupakan hal utama yang dicari.

Labelisasi teroris terhadap Islam yang dilakukan oleh media telah menempatkan Islam sebagai tertuduh. Lebih jauh, hal ini berdampak pada pemahaman yang keliru terhadap Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang, cinta damai dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. 'Islam' dapat diartikan sebagai 'penyerahan', dan berasal dari makna kata 'damai'. Dalam konteks religius kata ini berarti 'penyerahan menyeluruh kepada Kehendak Allah'. Orang yang memeluk agama Islam disebut 'Muslim'. Ajaran Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad yang merupakan nabi terakhir. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah yang disampaikan melalui Malaikat Jibril pada usia 40 tahun.

Islam meliputi beragam praktek keagamaan. Penganut agama Islam (Muslim) didwajibkan menunaikan rukun Islam yang meliputi lima pilar yang menyatukan Muslim kedalam sebuah

komunitas (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu). Selain rukun Islam, hukum Islam (Shari'a) merupakan aturan yang menata segala aspek kehidupan dan kemasyarakatan, mulai dari hukum yang mengatur masalah makanan yang boleh dikonsumsi, perbankan, kekayaan dan kesejahteraan.

Islamisme, yang oleh beberapa analisis Barat juga diartikan sebagai "Aktivitas Islam", didefinisikan sebagai pernyataan dan dukungan terhadap kepercayaan, arahan, aturan, atau kebijakan yang dianggap memiliki karakter ke-Islam-an. Meski demikian, pada prinsipnya dikotomi antara "Islam" atau "fundamentalisme Islam" dan "Islamisme" atau "Islam politik" secara internal tidak ada perbedaan sama sekali dari berbagai aspek praktis. Dan oleh karenanya mengabaikan keanekaragaman pandangan, tujuan dan metode yang sebenarnya dapat dijumpai dalam aktivitas Islam.

Terorisme sebagai salah satu bentuk kekerasan politik bertentangan dengan konsep kemanusiaan dalam Islam. Islam memperkenalkan dan menekankan konsep kemanusiaan universal (*al-ukhuwah al-insaniyyah*) yang menyarankan para pengikutnya untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan penghormatan seluruh umat manusia tanpa memperhatikan latar belakang dan agama mereka. Meskipun merupakan suatu keharusan bagi umat Muslim untuk menegakkan kebaikan dan mencegah yang mungkar (*amar ma'ruf nahy al-munkar*), penggunaan kekerasan - atau bahkan teror - merupakan tindakan kriminal. Ini juga bertentangan dengan ide Islam sebagai kemurahan hati Allah bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*).

### Daftar Pustaka

- Abuza, Z. (2003). *Militant Islam in Southeast Asia: crucible of terror*. London: Rienner Publishers, Inc.
- Ba'abduh, L. M. (2005). *Mereka Adalah Teroris: Sebuah Tinjauan Syari'at* [They are

- Terrorists: a Syari'a Approach]. Malang: Pustaka Qaulan Sadida.
- Barton, G. (2004). *Indonesia's Struggle: Jemaah Islamiyah and The Soul of Islam*. Sydney: University of New South Wales Press.
- Bustaman-Ahmad, K. (2003). *Satu Dasawarsa the Clash of Civilizations* [A decade of the clash of civilization]. Jogjakarta: Ar-Ruzz Press.
- Donald K. Emmerson, "Konflik Peradaban atau Fantasi Huntington?" dalam *Ulumul Quran*, No. 5, Vol. IV. 1993.
- Horgan, J. (2005). *The Psychology of Terrorism*. New York: Routledge
- Huntington, S.P. (1998). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: Touchstone Books.
- ICG. Middle East/North Africa Report No. 37. *Understanding Islamism*. 2 March 2005.
- Laquer, W. (1987). *The Age of Terrorism*. London: George Weidenfeld and Nicholson.
- Lewis, B. (1990). *The Roots of Muslim Rage*. Atlantic Monthly, September, 266.
- Lewis, J. (2005). *Language Wars: the Role of the Media and Culture in Global Terror and Political Violence*. London: Pluto Press.
- Mbai, A. *Kebijakan Pemberantasan Terorisme* [The policies on counter-terrorism]. Paper presented in a one day seminar "Causing root, action pattern and solution on acts of terror". University of Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta, 19 Juli 2005.
- Misrawi, Z. & K. Zada. (2004). *Islam Melawan Terorisme* [Islam against terrorism]. Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif.
- Nacos, B. L. (2002). *Mass-mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Sihbudi, R. 'Dimensi Internasional Terorisme' [The international dimension of terrorism].
- S. Kahfi. (2006). *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi* [Terrorism in the middle of globalised democracy]. Jakarta: Spectrum.
- Tuman, J. S. (2003). *Communicating Terror: The Rhetorical Dimension of Terrorism*. California: Sage Publications.
- Whittaker, D. J. (2004). *Terrorist and Terrorism in the Contemporary World*. Routledge: London.

#### Situs web

Asmani, J. M. *Salafi Radikal, Pesantren dan Terorisme*. [Online] Available: <http://islamlib.com/id/search.php?query=salafiradikal,pesantrendanterorisme&pageno=1> [2006, 3 March]

Noam Chomsky, "Clash of Civilization?" Alamat situs: <http://www.indiaseminar.com/2002/509/509%-20noam%20chomsky.htm>.

Jeane J. Kirkpatrick, "Response to Samuel P. Huntington 'The Clash of Civilizations?' The Modernizing Imperative: Tradition and Change". Alamat situs: [http://www/coloradocollege.edu/Dept/PS/Finley/PS425/-reading/Huntington2.html](http://www.coloradocollege.edu/Dept/PS/Finley/PS425/-reading/Huntington2.html).